

MODERASI BERAGAMA PERSPEKTIF ETIKA (ANALISIS PEMIKIRAN FRANZ MAGNIS-SUSENO)

Theguh Saumantri

IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Corresponding Author e-mail: saumantri.theguh@syekhnurjati.ac.id

Bisri

IAIN Syekh Nurjati Cirebon

e-mail: bisricahaya@gmail.com

ABSTRACT

Contemporary society is characterized by rapid growth and development in various aspects, including religious diversity and perspectives. The increasing openness of society to various thoughts and religious beliefs has significantly impacted social and cultural dynamics. The purpose of this research is to delve into the thoughts of Franz Magnis-Suseno in the context of religious moderation from an ethical perspective. This study employs a philosophical approach to literature review as an effort to delve into the concepts or theories of a prominent figure. The findings of this research illustrate that ethics, as a philosophical discipline that considers moral values and principles of goodness, plays a central role in guiding individuals to maintain moderation and respect religious differences. In the view of Franz Magnis-Suseno, the concept of religious moderation finds its locus theologicus within religion. Moderate attitudes within religion are placed within a theological framework, and religion becomes a reflection of goodwill towards all individuals, regardless of their differing beliefs.

Keywords: Religious Moderation, Ethics, Franz Magnis-Suseno.

ABSTRAK

Kehidupan masyarakat modern saat ini ditandai oleh pertumbuhan dan perkembangan yang pesat dalam berbagai aspek, termasuk dalam hal keragaman agama dan pandangan keagamaan. Semakin terbukanya masyarakat terhadap berbagai pemikiran dan keyakinan agama telah membawa dampak yang signifikan terhadap dinamika sosial dan budaya. Tujuan penelitian ini untuk menggali pemikiran Franz Magnis-Suseno dalam konteks moderasi beragama dari perspektif etika. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan dengan pendekatan filosofis sebagai upaya untuk mendalami konsep atau teori dari seorang tokoh. Hasil Penelitian ini menjelaskan bahwa etika, sebagai disiplin ilmu filsafat yang mempertimbangkan nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip kebaikan, memiliki peran sentral dalam membimbing individu-individu untuk menjaga moderasi dan menghormati perbedaan agama. Dalam pandangan Franz Magnis-Suseno konsep moderasi beragama merupakan locus theologicus-nya dalam

agama. Sikap moderat dalam agama ditempatkan dalam kerangka teologis, dan agama menjadi cerminan sikap baik terhadap semua individu, tanpa memandang perbedaan keyakinan.

Kata Kunci: Moderasi Beragama, Etika, Franz Magnis-Suseno.

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi dan interkonektivitas seperti sekarang ini, keragaman keyakinan dan pandangan menjadi ciri khas masyarakat yang semakin kompleks. Fenomena ini membawa tantangan baru dalam menjaga kerukunan dan harmoni antarindividu serta kelompok beragama. Di tengah tuntutan untuk memahami perbedaan dan menjalin dialog yang konstruktif, konsep moderasi beragama muncul sebagai solusi yang menarik. Moderasi beragama melibatkan pengembangan sikap bijak dalam menjalani kehidupan beragama, yang didasarkan pada toleransi, penghormatan terhadap perbedaan, serta penolakan terhadap sikap ekstremisme (Saumantri, 2023). Dalam konteks ini, pemikiran etika memainkan peran yang signifikan dalam membentuk landasan bagi praktik moderasi beragama. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis konsep moderasi beragama dari sudut pandang etika untuk memahami implikasinya dalam membangun hubungan yang harmonis di tengah keragaman.

Moderasi beragama mengartikan menempatkan agama sebagai unsur esensial dalam menjaga harmoni dalam kehidupan kolektif yang beragam. Dalam konsepsi umum, istilah toleransi merujuk pada sikap inklusif, terbuka, penuh kerelaan, dan kelembutan. UNESCO (Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa) yang didirikan pada tahun 1945 mendefinisikan moderasi sebagai postur gegap gempita yang memasukkan penghargaan, penerimaan, dan apresiasi satu sama lain di tengah variasi budaya, ekspresi bebas, serta identitas manusia (Fahri & Zainuri, 2019). Perspektif ini menunjukkan bahwa moderasi membutuhkan pondasi pengetahuan yang komprehensif, orientasi inklusif, komunikasi terbuka, kebebasan intelektual, dan agama. Dengan kata lain, moderasi berarti sikap positif dan penuh penghargaan terhadap sesama manusia, dalam upaya menjalankan hak asasi manusia secara bijaksana.

Moderasi beragama melibatkan penanganan yang seimbang terhadap isu-isu kepercayaan yang melekat pada individu, yang berkaitan dengan keyakinan akan akidah atau ketuhanan yang diyakini oleh seseorang. Ini melibatkan pemberian kebebasan kepada setiap individu untuk memilih dan mengamalkan agama (mempeluk keyakinan) sesuai dengan preferensi pribadi mereka, serta menghormati pelaksanaan ajaran-ajaran yang mereka anut atau yakini (Casanova, 2018). Selain itu, moderasi beragama juga mencakup ekspresi dari pengalaman religius dalam wujud komunitas. Konsep moderasi beragama ini dapat dilihat sebagai bentuk adaptasi dalam interaksi sosial (Kinloch, 2015).

Tidak hanya itu, moderasi beragama juga mewakili pelaksanaan pengalaman keagamaan dalam konteks komunal. Ini tidak hanya berarti berinteraksi dengan sesama anggota kelompok agama yang sama, tetapi juga menjalin hubungan dengan individu-individu yang memiliki keyakinan

agama yang berbeda. Di tengah masyarakat yang semakin beragam, wujud moderasi beragama menjadi krusial dalam menjaga stabilitas sosial, mencegah konflik ideologis maupun fisik di antara kelompok-kelompok beragama yang berbeda (Hidayatulloh & Saumantri, 2023a).

Etika adalah sebuah bidang filsafat yang membahas tentang prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang membimbing perilaku manusia dalam berbagai aspek kehidupan (Bartens, 2007). Dalam konteks moderasi Beragama, etika menjadi landasan penting dalam membahas dan menganalisis moderasi beragama, sebuah konsep yang menekankan pada keseimbangan dan inklusivitas dalam praktik-praktik keagamaan. Moderasi beragama melibatkan upaya untuk menjaga keseimbangan antara keyakinan agama individu dan hubungan sosial yang harmonis di tengah masyarakat yang multicultural (Novan Risbayana et al., 2022).

Indonesia, sebagai salah satu negara multikultur terbesar di dunia, mewujudkan kompleksitas dan keragaman dalam segala aspeknya, baik dari segi sosial-budaya maupun geografis. Bukan rahasia lagi bahwa Indonesia menghimpun sejumlah besar kelompok etnis, agama, budaya, dan elemen lainnya yang bersifat plural dan sekaligus heterogeny (Umar, 2021). Keberagaman ini mengharuskan Indonesia mengembangkan pendekatan moderat dalam mengelola dinamika kompleksnya, baik dalam konteks bernegara maupun bermasyarakat. Salah satu tokoh yang muncul sebagai inisiator, pengembang, dan penganjur prinsip toleransi di Indonesia adalah Prof. Dr. Franz Magnis-Suseno.

Franz Magnis-Suseno, seorang cendekiawan agama dan filsafat terkemuka, memberikan kontribusi yang berharga dalam wacana moderasi beragama. Pemikirannya yang berakar dalam tradisi filosofis dan teologis mengajak untuk merenungkan prinsip-prinsip etika yang dapat membentuk dasar bagi perilaku moderat dalam beragama. Dalam menggali pemikiran Franz Magnis-Suseno tentang moderasi beragama, dapat ditemukan wawasan yang mendalam tentang bagaimana nilai-nilai etis dapat membentuk sikap inklusif dan mengedepankan martabat kemanusiaan dalam konteks beragama.

Menurut Karen Armstrong, etika merupakan seperangkat prinsip dan nilai-nilai moral yang membimbing tindakan individu dalam menjalin hubungan yang baik dengan sesama manusia dan dunia sekitarnya. Etika melibatkan pemahaman tentang tanggung jawab sosial, empati terhadap penderitaan orang lain, serta kesadaran akan dampak dari tindakan individu terhadap lingkungan dan komunitas. Lebih dari sekadar aturan-aturan atau norma-norma, etika merangkul pandangan luas tentang kebaikan, keadilan, dan kesetaraan, mendorong individu untuk berperilaku dengan penuh rasa tanggung jawab dan rasa hormat terhadap keberagaman dan martabat kemanusiaan (Judrah, 2020).

Dalam Islam, etika menjadi bagian integral dari ajaran agama yang mengatur perilaku dan interaksi manusia dengan Allah, sesama manusia, dan alam sekitar. Etika Islam meliputi seperangkat prinsip moral dan pedoman perilaku yang diambil dari ajaran Al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Etika dalam Islam bukan hanya sekadar aturan-aturan

formal, tetapi mencakup dimensi spiritual, moral, dan sosial dalam kehidupan sehari-hari (Syarifah Habibah, 2015).

Dalam penelitian ini secara rinci membahas konsep moderasi beragama perspektif pemikiran Franz Magnis-Suseno. Dengan penekanan pada dimensi etika, penelitian ini akan mengupas perjalanan hidup Magnis-Suseno sebagai dasar pemikiran toleransinya dan menggali pemahaman yang lebih mendalam tentang prinsip moderasi beragama yang ditekankannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan paradigma kualitatif dengan melakukan telaah Pustaka. Penelitian ini mengadopsi pendekatan filosofis yang bertujuan untuk mendalami konsep atau teori yang diemban oleh seorang tokoh melalui pendekatan hermeneutika. Sesuai pandangan (Bakker & Zubair, 2015), hermeneutika digunakan sebagai metode untuk meresapi serta menafsirkan teks secara mendalam. Penelitian ini juga termasuk penelitian kepustakaan atau studi literatur dan bahan pustaka yang relevan. Sumber-sumber yang menjadi landasan penelitian ini adalah karya-karya tulis Franz Magnis-Suseno yang membahas etika, bersama dengan artikel-artikel dan penelitian terdahulu yang mengulas tema yang sama dengan fokus penelitian ini.

Setelah sumber data terkumpul, langkah berikutnya adalah melaksanakan analisis teks dengan memanfaatkan teknik “*verstehen*,” suatu usaha untuk meraih pemahaman mendalam tentang makna yang tersirat dalam teks, dengan meletakkan diri pada posisi seorang yang memahami (Izza, 2014). Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian ini mampu mengungkapkan substansi dan interpretasi dari pandangan Franz Magnis-Suseno mengenai etika dalam konteks moderasi beragama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Biografi Franz Magnis-Suseno

Franz Wilhelm Magnis-Suseno lahir pada tanggal 18 April 1936 di Tenggarong, Kalimantan Timur, Indonesia. Ia adalah anak dari pasangan Paul Magnis, seorang dokter asal Jerman, dan Anna Suseno, seorang perempuan Jawa. Karena latar belakang percampuran budaya dan keturunannya yang beragam, Magnis-Suseno tumbuh dalam lingkungan yang kaya akan pengalaman dan pandangan hidup. Pendidikan awalnya dimulai di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Ia kemudian melanjutkan studi di Seminari Menengah Santo Yohanes Lateran, Tanjung Selor, dan mengambil gelar sarjana filsafat di Seminari Mertoyudan, Magelang. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan teologi di Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi (STFT) Driyarkara, Jakarta (Roosseno, 2016).

Pada tahun 1963, Magnis-Suseno melanjutkan studi ke luar negeri, tepatnya di Universitas Frankfurt, Jerman, di mana ia mendalami filsafat di bawah bimbingan tokoh terkenal, Profesor Max Horkheimer. Ia berhasil meraih gelar Doktor Filsafat dengan disertasinya yang berjudul “*Vom Sein zum Handeln: Eine Untersuchung zur Begründung der Ethik bei Karl Jaspers.*”

Setelah menyelesaikan studi doktornya, Magnis-Suseno kembali ke Indonesia dan terlibat dalam berbagai kegiatan akademik dan sosial. Ia

menjadi dosen di STFT Driyarkara dan mengajar di berbagai perguruan tinggi di Indonesia, termasuk Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. Ia juga aktif dalam berbagai organisasi lintas agama yang bertujuan untuk mempromosikan dialog antaragama dan toleransi. Franz Magnis-Suseno dikenal karena kontribusinya dalam memadukan filsafat dengan agama, terutama dalam konteks budaya dan masyarakat Indonesia yang beragam. Pemikirannya cenderung progresif, dengan penekanan pada dialog, toleransi, dan etika. Ia telah menulis banyak buku dan artikel tentang berbagai isu, termasuk etika, pluralisme, dialog antaragama, dan perkembangan sosial di Indonesia

Sekitar 18 buku serta lebih dari 200 karangan populer dan ilmiah sudah ditulisnya, terutama di bidang etika, filsafat politik, dan filsafat Jawa. Salah satunya adalah 'Berfilsafat Dari Konteks'. Buku ini membahas dan mendiskusikan kedudukan filsafat maupun etika dalam kehidupan Masyarakat (Franz Magnis Suseno, 2001). Tulisannya yang lain adalah 'Javanese Etics and World-View. The Javanese Idea of the Good Life' (Franz Magnis-Suseno, 1998), 'Filsafat sebagai Ilmu Kritis' (Franz Magnis Suseno, 2012), 'Filsafat Kebudayaan Politik: Butir-Butir Pemikiran Kritis' (Franz Magnis-Suseno, 2004), dan '12 Tokoh Etika' (Franz Magnis-Suseno, 2000a). Buku yang lain adalah 'Etika Jawa: Sebuah Analisa Falsafi Tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa' (Franz Magnis-Suseno, 2001). Buku ini menjelaskan tentang kehidupan orang Jawa beserta adat serta perilaku sehari-hari mereka yang penuh dengan sistem keteraturan yang melingkupinya. Ia juga menulis 'Kuasa dan moral' (Franz Magnis-Suseno, 2005a). Buku ini mengulas beberapa pertanyaan kunci etika politik kontemporer, pembangunan yang adil dan berkaitan antara keadilan sosial dan demokrasi.

Gagasan berpikir Franz Magnis-Suseno banyak dipengaruhi tokoh-tokoh filsafat Barat yang sangat mementingkan gagasan dan nilai-nilai etika. Menurutnya, etika mencapai puncaknya yang luhur dalam konsepsi humanisme, karena etika secara konsekuen mengakui dan menghendaki kesamaan derajat semua orang (Franz Magnis Suseno, 2005). Menurut Magnis-Suseno, etika mengajarkan bahwa terhadap siapapun hendaknya bersikap baik hati, dengan tidak memandang warna kulit, suku, budaya, dan agama. Perempuan berhak atas perlakuan sama dengan laki-laki. Buruh harus dihormati hak-haknya. Musuh berhak atas belas kasih dan pengampunan. Dengan kerangka berpikir seperti itu, moralitas manusia menemukan kesadaran akan hak-hak asasi setiap orang sebagai manusia. Magnis-Suseno merumuskan cita-cita negara se-dunia dan persaudaraan universal (Franz Magnis-Suseno, 2001).

Secara politik pun Magnis-Suseno mempunyai pandangan dan gagasan bahwa kekuasaan digunakan untuk menegakkan keadilan dan menciptakan ketentraman serta kesejahteraan rakyat. Dalam mempertahankan kekuasaan dan berpolitik itu masyarakat dan terutama pihak-pihak yang berkuasa harus tetap menjunjung pada nilai-nilai moralitas berpolitik. Kekuasaan dipandang sebagai wadah untuk memenuhi dan menciptakan ketentraman, kesejahteraan, dan keadilan kepada rakyat di sekelilingnya. Kekuasaan harus mempunyai legitimasi religius. Implikasi

terpenting legitimasi religius adalah bahwa penguasa dalam menjalankan kekuasaannya berada di atas penilaian moral (Franz Magnis Suseno, 1988).

Dalam hal bernegara Magnis-Suseno menekankan tiga sokoguru atau prinsip utama filsafat negara. Prinsip-prinsip itu mendasari gagasan-gagasannya tentang moderasi beragama. Pertama, keyakinan yang pada hakikatnya bersifat religius. Dalam konteks ini negara tidak berhak untuk menuntut ketaatan mutlak. Manusia harus lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Kedua, dalam menjalankan tugasnya negara terikat pada norma-norma etis dan gagasan keadilan. Norma etis dan keadilan menjadi prinsip yang paling dasar. Ketiga, kekuasaan negara harus berjalan melalui jalur-jalur suatu sistem hukum (Viktorahadi, 2022a).

Menurut Magnis-Suseno ada empat alasan mengapa pada zaman sekarang etika sangat diperlukan (Franz Magnis-Suseno, 2000b). Pertama, kehidupan dalam masyarakat yang semakin pluralistik, termasuk juga dalam bidang moralitas. Setiap hari manusia saling bertemu. Manusia itu berasal dari suku, daerah, dan agama yang berbeda-beda sehingga menimbulkan sekian banyak pandangan moral yang saling bertentangan. Akibatnya, mereka menganggap bahwa paham dan gagasan mereka yang paling benar. Kedua, manusia hidup dalam masa transformasi masyarakat yang tanpa tanding. Perubahan terjadi di bawah hantaman kekuatan mengenai semua segi kehidupan, yaitu gelombang modernisasi. Gelombang ini telah melanda sampai ke segala penjuru tanah air, sampai ke pelosok-pelosok terpencil. Rasionalisme, individualisme, kepercayaan akan kemajuan, konsumerisme, sekulerisme, pluralisme religius, serta pendidikan modern secara hakiki mengubah lingkungan budaya dan rohani di Indonesia. Ketiga, proses perubahan sosial budaya dan moral telah dipergunakan berbagai pihak untuk memancing dalam air keruh. Mereka menawarkan ideologi-ideologi sebagai juru penyelamat.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Aini & Dewi, 2022) dijelaskan bahwa etika sanggup menghadapi ideologi-ideologi itu dengan kritis dan objektif. Selain itu, etika dapat membentuk penilaian sendiri supaya tidak mudah terpancing, tidak ekstrim, dan tidak cepat-cepat memeluk segala pandangan baru, sekaligus juga tidak menolak nilai-nilai hanya karena baru dan belum biasa. Keempat, etika juga diperlukan kaum agama yang di satu pihak menemukan dasar kemantapan mereka, di lain pihak sekaligus mau berpartisipasi tanpa takut-takut dan dengan menutup diri dalam semua dimensi kehidupan masyarakat yang sedang berubah. Hingga saat ini, Franz Magnis-Suseno tetap menjadi salah satu intelektual dan pemikir terkemuka Indonesia yang berjuang untuk memajukan pemahaman antarbudaya, toleransi, dan kerjasama antaragama dalam rangka menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan harmoni (Rici et al., 2022).

B. Etika dan Klasifikasinya dalam Pandangan Magnis Suseno

Secara etimologi, istilah “etika” berasal dari bahasa Yunani *kuno* “*ethos*” (ἦθος), yang merujuk pada karakter, kebiasaan, atau adat-istiadat yang mengarah pada cara hidup atau perilaku tertentu. Kata ini juga

berhubungan dengan kata “*ethikos*” (*ἠθικός*), yang berarti “moral” atau “etis.” Penggunaan istilah ini berkembang seiring waktu untuk merujuk pada studi tentang moralitas, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip yang membimbing perilaku manusia (Rachels, 2013).

Etika sebagai studi filsafat berfokus pada refleksi mendalam tentang sifat moralitas, asal usul nilai-nilai etis, dan bagaimana manusia seharusnya berperilaku berdasarkan prinsip-prinsip moral ini (Rosnawati et al., 2021). Aristoteles menggunakan istilah “etika” untuk merujuk pada studi tentang moralitas dan perilaku manusia yang baik. Pemikiran etika Aristoteles sangat mempengaruhi perkembangan pemikiran etika dan masih memiliki dampak besar dalam konteks filsafat modern (Ali, 2017). Etika membahas pertanyaan-pertanyaan tentang apa yang dianggap benar atau salah, bagaimana mengambil keputusan moral, dan bagaimana menerapkan prinsip-prinsip moral ini dalam kehidupan sehari-hari.

Secara terminologi, “etika” merujuk pada cabang filsafat yang mempelajari dan menganalisis tentang apa yang dianggap benar dan salah, baik dan buruk, serta prinsip-prinsip moral yang membimbing perilaku manusia. Etika melibatkan pemeriksaan dan refleksi mendalam terhadap nilai-nilai, norma-norma, dan prinsip-prinsip moral yang membentuk dasar tindakan dan keputusan individu serta implikasi etisnya dalam masyarakat (Kuntowijoyo, 2010).

Menurut (Riyadi, 2015) Etika tidak hanya memperhatikan tindakan individu, tetapi juga membahas isu-isu yang lebih luas, seperti konsekuensi sosial, keadilan, kebenaran, hak asasi manusia, dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Etika bertujuan untuk membantu manusia memahami dasar-dasar moralitas, mengambil keputusan yang lebih baik, dan hidup secara harmonis dalam masyarakat.

Etika merupakan cabang filsafat yang mempelajari tentang apa yang dianggap benar atau salah, baik atau buruk, serta bagaimana manusia seharusnya berperilaku dalam berbagai situasi. Etika membahas masalah moral dan normatif, berfokus pada prinsip-prinsip moral yang membimbing tindakan manusia dan hubungan mereka dengan orang lain, lingkungan, dan masyarakat secara luas. Etika melibatkan pemeriksaan nilai-nilai, norma-norma, dan prinsip-prinsip moral yang membentuk dasar dari keputusan dan tindakan individu serta dampaknya terhadap dunia di sekitarnya. Etika juga melibatkan refleksi tentang akar dan justifikasi dari norma-norma ini, serta implikasi etis dari tindakan-tindakan manusia (Franz Magnis-Suseno, 2005a).

Immanuel Kant dalam filsafatnya mengembangkan etika deontologis, yang menekankan pada kewajiban moral dan tindakan yang sesuai dengan prinsip universal yang dapat diterapkan oleh semua orang. Bagi Kant, tindakan dianggap baik jika didasarkan pada kewajiban moral yang berlaku secara universal, tanpa mempertimbangkan konsekuensinya (Al Azis, 2021). Dalam pemikiran Magnis-Suseno, etika merupakan usaha untuk menghubungkan nilai-nilai etika dengan budaya, agama, dan realitas sosial masyarakat Indonesia yang beragam. Maka dari itu, terdapat aspek penting dalam pemahaman etika yang melibatkan penggalian mendalam terhadap norma-norma moral, refleksi tentang nilai-nilai universal, serta penerapan

prinsip-prinsip etis dalam situasi-situasi konkret (Franz Magnis-Suseno, 2000b).

Pertama, Etika sebagai Sumum Bonum: Magnis-Suseno mengartikan etika sebagai upaya untuk mencapai “kehidupan yang baik” (sumum bonum) bagi individu dan masyarakat. Kehidupan yang baik ini melibatkan pembentukan karakter yang baik, penerapan nilai-nilai moral, dan tindakan yang mengarah pada kesejahteraan umum. *Kedua*, Konteks Budaya dan Agama: Ia menekankan pentingnya memahami dan menghargai nilai-nilai budaya dan agama dalam konteks etika. Magnis-Suseno berpendapat bahwa nilai-nilai etika tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai budaya dan agama yang membentuk identitas masyarakat. Ia menganjurkan dialog antara berbagai tradisi agama dan budaya untuk mencapai pemahaman bersama tentang prinsip-prinsip moral. *Ketiga*, Prinsip-Prinsip Moral Universal: Meskipun menekankan nilai-nilai budaya, Magnis-Suseno juga menegaskan adanya prinsip-prinsip moral universal yang dapat diterapkan secara lintas budaya. Ia berpendapat bahwa terdapat nilai-nilai dasar yang bersifat universal, seperti kejujuran, keadilan, dan kasih sayang, yang seharusnya dijunjung tinggi oleh semua manusia. *Keempat*, Etika Dalam Tindakan Konkret: Magnis-Suseno mengajukan pandangan etika yang praktis dan diterapkan dalam tindakan-tindakan sehari-hari. Ia mendorong individu untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai etis dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi. Dan *kelima*, Keterlibatan Sosial dan Kritis: Pandangan etika Magnis-Suseno melibatkan keterlibatan sosial dan kritis dalam menghadapi isu-isu moral yang kompleks. Ia mendorong individu untuk tidak hanya mengikuti norma-norma konvensional, tetapi juga berpikir kritis dan berani dalam mempertanyakan ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi manusia (Franz Magnis-Suseno, 2009).

Etika dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa kriteria, yang mencerminkan pendekatan, fokus, dan ruang lingkup analisisnya. *Pertama*, Etika Normatif dan Deskriptif yang berfokus pada penyusunan aturan dan prinsip moral yang seharusnya mengatur tindakan manusia. Etika ini mengevaluasi apa yang dianggap baik atau buruk. Sementara itu, etika deskriptif lebih mengamati dan menganalisis apa yang sebenarnya dilakukan manusia dalam konteks sosial dan budaya tertentu.

Kedua, Etika Metaetika, konsep ini adalah refleksi filosofis tentang asal usul, makna, dan justifikasi dari konsep-konsep etika seperti “baik,” “benar,” dan “kewajiban.” Etika metaetika membahas pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang sifat moralitas dan apakah nilai-nilai moral bersifat objektif atau subjektif. *Ketiga*, Etika Normatif Terapan yang melibatkan penerapan prinsip-prinsip moral dalam situasi-situasi konkret. Etika normatif terapan mencakup subdisiplin seperti etika bisnis, etika medis, etika lingkungan, dan lain-lain. Setiap subdisiplin ini menerapkan prinsip-prinsip etika umum ke dalam konteks khusus. *Empat*, Etika Deontologi dan Konsekuensialisme etika deontologis menekankan pada kewajiban dan aturan moral yang harus diikuti, terlepas dari hasil akhirnya. Sementara itu, pendekatan konsekuensialisme memandang bahwa keputusan etis dievaluasi berdasarkan akibat atau konsekuensi yang dihasilkan.

Kelima, Etika Utilitarianisme dan Etika Deontologi. Utilitarianisme menekankan bahwa tindakan yang benar adalah tindakan yang menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Etika deontologi, di sisi lain, fokus pada kewajiban dan prinsip moral tertentu yang harus diikuti, terlepas dari akibatnya. *Enam*, Etika Virtue (Kebajikan) yang membicarakan pada pengembangan karakter dan kebajikan individu, seperti kejujuran, kesabaran, dan kebijaksanaan. Etika kebajikan menganggap bahwa perilaku etis berasal dari karakter yang baik. Terakhir, *tujuh*, Etika Agama dan Etika Sekuler. Etika agama bergantung pada ajaran-ajaran keagamaan dan keyakinan dalam menentukan tindakan moral. Etika sekuler, di sisi lain, berusaha mengembangkan kerangka kerja etis yang independen dari agama (Graham, 2019).

C. Moderasi Beragama dalam Landasan Etis

Melalui konsep *epoché*, bagian ini menjalankan proses menahan pengertian-pengertian sebelumnya tentang suatu pembasan etika, dengan tujuan untuk kemudian menggali pemahaman yang lebih dalam melalui sudut pandang tokoh. Gagasan-gagasan yang dibahas dalam konteks ini merujuk pada konsep-konsep moderasi beragama yang telah tercetak dalam tulisan-tulisan atau ekspresi lisan dari Franz Magnis-Suseno. Dengan cara yang lebih sederhana, fokus penelitian ini difokuskan pada kepribadian Magnis-Suseno. Lebih jauh, dalam kerangka deskripsi tekstual dan deskripsi struktural, penelitian ini mengeksplorasi pandangan Magnis-Suseno terhadap gagasan-gagasan moderasi beragama.

Moderasi beragama merupakan suatu konsep yang mengacu pada pendekatan yang seimbang, rasional, dan bijaksana dalam menjalankan keyakinan agama. Konsep ini mendorong individu untuk menghindari ekstremisme dan fanatisme dalam interpretasi dan praktik agama (Saumantri, 2022). Dalam konteks moderasi beragama, individu cenderung mengambil jalan tengah yang mempertimbangkan nilai-nilai etika, toleransi, dan keberagaman. Moderasi beragama berasal dari kata "moderasi," yang merujuk pada sikap keseimbangan, tengah-tengah, atau tidak berlebihan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam konteks agama. Istilah ini menggambarkan pendekatan yang tidak ekstrem atau fanatik dalam menjalankan keyakinan agama, melainkan lebih mengutamakan sikap toleransi, penghormatan, dan keseimbangan (Junaedi, 2019).

Menurut Magnis-Suseno, sikap moderat dalam beragama adalah sikap menerima dengan kepenuhan hati akan keberadaan setiap warga bangsa Indonesia dengan seluruh perbedaan latar belakang agama, suku bangsa, dan budaya yang dimilikinya. Dalam makna itu, harmoni dalam hidup keberagaman hanya mungkin terwujud jika sikap moderat secara konsisten diterapkan (Franz Magnis-Suseno, 2005b). Moderasi beragama disalahpahami jika dianggap hanya sebagai penyamaan. Memahami pihak lain karena 'sebenarnya' pandangannya tidak berbeda dari kelompok sendiri bukanlah moderasi beragama, melainkan sekadar mengatasi salah paham. Misalnya, semula dikira kepercayaannya berbeda. Sesudah dilihat dengan lebih teliti, ternyata pada hakikatnya sama.

Menurut Magnis-Susesno, orang baru dapat bicara tentang moderasi beragama jika ada kesediaan yang besar dan lapang untuk menerima dan mengakui pluralitas. Artinya, menerima perbedaan. Moderasi beragama dalam konteks ini dapat berarti menerima saudara atau kelompok saudara, meskipun pandangan, kepercayaan, dan keyakinannya berbeda. Bersikap moderat berarti menerima orang dan kelompok orang lain dalam kekhasannya dan dalam perbedaan. Orang belum bersifat moderat jika ia tidak keberatan dengan keyakinan agama lain hanya karena baginya semua agama sama saja. Orang baru moderat jika ia tidak dapat mengikuti (seluruh) keyakinan saudaranya dan ia tetap menerimanya dengan baik dan hormat. Kemampuan untuk menghormati yang berbeda, yang tidak mungkin diyakini, itulah yang dinamakan moderasi beragama (Franz Magnis Suseno, 2007).

Moderasi beragama bukanlah sekadar menciptakan suasana rukun. Menurut Magnis-Suseno, rukun diartikan sebagai 'berada dalam keadaan selaras' atau 'tenang dan tentram', 'tanpa perselisihan dan pertentangan', dan 'bersatu dalam maksud untuk saling membantu'. Kondisi rukun adalah suatu keberadaan di mana semua pihak berada dalam keadaan damai satu sama lain, suka bekerjasama, saling menerima, dalam suasana tenang dan sepakat (Franz Magnis Suseno, 2007). Lebih dari itu, moderasi beragama adalah suatu kebiasaan atau bagian dari kebudayaan bangsa Indonesia yang menerima keberagaman dengan penuh ketulusan. Dengan kata lain, moderasi beragama adalah gaya hidup ciri khas bangsa Indonesia (Bedong, 2020).

Gagasan-gagasan moderasi beragama Magnis-Suseno sangat dipengaruhi kajiannya terhadap etika dan moral. Magnis-Suseno menegaskan adanya tujuh prinsip etika yang harus dipahami dan dihayati, terutama saat mereka hidup dalam masyarakat majemuk atau masyarakat multicultural (Viktorahadi, 2022b). Ketujuh prinsip etika itu mewujudkan dalam sikap moderat (Franz Magnis-Suseno, 2005b).

Pertama, prinsip kebaikan hati. Sikap baik terhadap siapa pun, kawan maupun lawan menjadi tuntunan dasar Tuhan terhadap para pengikut-Nya. Begitu pula tujuan segala pembangunan adalah supaya keadilan, kebahagiaan, kebebasan, dan perdamaian bersama bertambah. Dalam kehidupan bermasyarakat pun manusia harus menunjukkan kesediaan untuk memaafkan, berdamai, untuk menghormati lawan. *Kedua*, berpihak pada kehidupan. manusia tidak memakai kematian sebagai sarana untuk mencapai tujuan-tujuannya. Oleh karena itu, hakikatnya manusia menolak aborsi dan pembunuhan janin demi tujuan penelitian. *Ketiga*, prinsip paling umum Ajaran Sosial keagamaan adalah prinsip kesejahteraan umum. Yang dimaksud adalah negarawan dan politisi, baik di tingkat nasional maupun lokal, ditugasi untuk mengusahakan kepentingan umum dan bukan kepentingannya sendiri. Negara pun bukan tujuan pada dirinya sendiri, melainkan diciptakan untuk melayani kebutuhan masyarakat. Negara bagi manusia, bukan manusia bagi negara.

Keempat, prinsip subsidiaritas. Prinsip ini mengatakan bahwa lembaga yang lebih tinggi wajib membantu lembaga-lembaga lebih rendah jika mereka tidak dapat menyelesaikan sendiri keperluan-keperluan mereka. Dari sudut

terbalik, tugas-tugas yang dapat diselesaikan secara memuaskan oleh lembaga-lembaga lebih rendah, tidak boleh diambil alih lembaga lebih tinggi. Prinsip itulah yang menjadi latar belakang 'otonomi daerah'. Apa yang dapat dikerjakan propinsi, jangan ditarik ke pusat oleh pemerintah nasional. Apa yang dapat diselesaikan di tingkat kelurahan, bukan urusan bupati. *Kelima*, prinsip solidaritas. Prinsip ini menegaskan bahwa dalam pembangunan semua pihak harus sama beruntung dan sama berkorban, senasib sepenanggungan. Solidaritas berarti bahwa yang lemah, miskin, dan tak berdaya harus didahulukan (*preferential option for the poor*). Solidaritas bangsa terlihat dalam bagaimana bangsa itu memperlakukan anggota-anggotanya yang 'kurang berarti'. Prinsip solidaritas juga memuat tuntutan bahwa perwujudan keadilan sosial menjadi tujuan pertama pembangunan. Dewasa ini solidaritas harus menjangkau juga generasi-generasi yang akan datang. Oleh karena itu, manusia wajib menjaga keutuhan lingkungan hidup supaya generasi-generasi mendatang menemukan bumi yang masih pantas dihuni.

Keenam, menjunjung tinggi martabat manusia yang diciptakan menurut citra Tuhan dan dipanggil menjadi anak-Nya yang tercinta menjadi nyata dalam prinsip hormat terhadap hak-hak asasi manusia. Oleh karena itu, politisi dan tentu segenap umat yang beragama, membela hak-hak dasar manusia. Dengan kata lain, perwujudan kehidupan yang demokratis, terutama hak-hak asasi manusia inti tidak pernah boleh dilanggar dan tidak pernah boleh dibiarkan pelanggarannya terjadi. Di situ termasuk, larangan terhadap pembunuhan sewenang-wenang, terhadap penggunaan sistematis penyiksaan (*torture*), baik fisik maupun psikis, terhadap hukuman kejam dan bengis, terhadap segenap pengekangan kebebasan beragama dan kepercayaan menurut iman atau keyakinannya, terhadap penangkapan sewenang-wenang, perbudakan, perdagangan manusia (perempuan, anak di bawah umur), terhadap kekejaman rutin oleh pihak keamanan. Misalnya, pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, penghancuran basis penghidupan para penduduk dalam wilayah yang memiliki masalah keamanan, terhadap penindasan berbentuk genosida, pemerkosaan hak minoritas etnik, agama, atau budaya atas budaya, bahasa, agama dan atas otonomi terbatas berdasarkan adat-istiadat).

Ketujuh, prinsip penolakan kekerasan. Dalam mengusahakan sasaran-sasaran, termasuk yang baik, tidak digunakan kekerasan. Masalah-masalah dan konflik-konflik yang muncul wajib dipecahkan secara damai. Pemakaian ancaman, pemerasan, dan paksaan untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan harus ditolak. Prinsip-prinsip etis yang menjadi dasar sikap moderat menurut Magnis-Suseno ini tidak hanya mencakup kebebasan beragama, tetapi juga mencakup masalah-masalah kelangsungan hidup generasi yang akan datang apa pun agama dan kepercayaan mereka. Dalam hal ini, Magnis-Suseno sangat meyakini bahwa agama memegang peranan strategis dalam mempromosikan moderasi beragama yang berujung atau bertujuan pada kebaikan bersama.

D. *Locus Theologicus* dalam Moderasi Beragama

Dalam sejumlah gagasan dan pandangannya, Franz Magnis-Suseno menegaskan bahwa moderasi menemukan *locus theologicus*-nya dalam agama. Oleh karena itu, menurut Magnis-Suseno, agama tidak boleh mengancam. Agama harus baik terhadap siapa saja. Terhadap siapa saja juga berarti, tidak hanya terhadap mereka yang se-iman. Dengan kata lain, sikap yang seharusnya dimiliki setiap orang beragama adalah juga baik terhadap mereka yang imannya berbeda. Prinsipnya, mereka yang berbeda keyakinan pun diciptakan dan dicintai Tuhan. Setiap orang sekecil bagaimana pun, dengan kepercayaan tulus mana pun, memiliki tujuan pada dirinya sendiri untuk beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Agama yang menakutkan sudah tidak berjangkar lagi pada tuhan yang diakui (Magnis-Suseno, n.d.; Mellisa & Mubarok, 2015).

Magnis-Suseno menegaskan bahwa moderasi dalam agama ditempatkan dalam kerangka teologis, dan agama seharusnya tidak menjadi ancaman atau menyebabkan ketakutan. Ia berpendapat bahwa agama harus mempromosikan sikap baik terhadap semua individu, tanpa memandang perbedaan keyakinan. Pandangan ini menekankan bahwa setiap individu, meskipun berbeda keyakinan, adalah makhluk Tuhan yang dihargai dan dicintai. Oleh karena itu, agama seharusnya tidak menciptakan ketakutan dan harus memandang semua orang dengan kasih dan toleransi.

Magnis-Suseno melihat bahwa harapan bertumbuh dan berkembangnya moderasi beragama sangatlah besar di Indonesia. Meski mengalami masa sulit pasca-reformasi, Indonesia masih dinilai lebih baik dibanding Mesir. Magnis-Suseno percaya bahwa hubungan antar umat beragama di Indonesia memberikan nilai perekat bagi keutuhan bangsa dan negara. Peran organisasi semacam Nahdlatul Ulama (NU – Kebangkitan Ulama atau Kebangkitan Cendekiawan Islam) dan Muhammadiyah berperan sangat besar dalam upaya-upaya tersebut. Akan tetapi, Magnis-Suseno memberi catatan bahwa bangsa Indonesia dihadapkan dengan dua tantangan. *Pertama*, budaya konsumerisme kapitalistik yang membuat hidup nirmakna. *Kedua*, gerakan ekstremisme yang memberi resep-resep sederhana untuk masalah di dunia ini yang rumit dan kompleks (Mellisa & Mubarok, 2015).

Menurut Magnis-Suseno perlu dikembangkan suasana keterbukaan ke dalam di lembaga-lembaga pendidikan tinggi Islam. Juga sangat perlu upaya untuk tidak hanya berfokus pada ilmu tentang agama Islam, tetapi pada semua ilmu pengetahuan sekuler. Selain itu, suasana diskursus kritis antara dosen, peneliti, dan mahasiswa, baik di dalam maupun di luar kampus perlu terus dikembangkan. Islam di Indonesia sebagai agama yang dipeluk mayoritas penduduknya berada dalam posisi bagus karena sebagian besar sudah lama menempuh kebijakan keterbukaan dan diskursif itu. Sikap itu perlu dipertahankan dan dikembangkan, juga berhadapan dengan tendensi-tendensi eksklusif yang juga ada yang untuk sebagian merupakan reaksi terhadap yang dinamakan keterpojokan Islam. Akan tetapi, jelas kaum intelektual Islam justru tidak perlu masuk terpojok. Mereka boleh cukup percaya diri untuk menjadi partner diskursus intelektual global (Magnis-Suseno SJ, 2008).

Secara khusus, untuk pemerintahan yang sedang berlangsung di Indonesia, Magnis-Suseno juga menggantungkan harapannya terkait sikap moderat. Dalam jumpa pers forum 'Dialog dan Kerjasama Lintas Iman untuk Indonesia yang lebih baik, Damai dan Toleran secara Kritis-Konstruktif' di Yogyakarta, Rabu (20/11/2019), Franz Magnis-Suseno memohon dengan sangat supaya pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tegas terhadap segala bentuk intoleransi yang terjadi di Indonesia supaya aneka macam peristiwa intoleransi tidak terulang kembali (Franz Magnis-Suseno, 2019). Magnis-Suseno mengungkapkan bahwa dalam tahun-tahun terakhir, kejadian-kejadian intoleransi terus bertambah. Menurut Magnis-Suseno, situasi dalam masyarakat sebagai keseluruhan masih tetap toleran. Indonesia itu negara yang toleran, dalam arti di mana-mana minoritas bisa hidup dan beribadah di tengah mayoritas tanpa kesulitan serta tanpa takut.

Menurut Magnis-Suseno, komunikasi juga terjalin dengan baik, tanpa membedakan mayoritas dan minoritas. Magnis-Suseno menegaskan bahwa jika dibiarkan saja, tindak-tanduk intoleransi dapat merusak kehidupan bersama. Menurut Magnis-Suseno, Negara Republik Indonesia harus intoleran terhadap intoleransi. Mereka yang mau merusak moderasi beragama tidak boleh ditoleransi. Secara sederhana, acuannya adalah hukum dan undang-undang dasar yang berlaku. Jika alat negara membiarkan massa yang beringas melakukan penutupan tempat ibadah atau memaksa upacara keagamaan, acara sebuah diskusi dibatalkan, itu menjadi signal yang sangat buruk. Hal itu tidak boleh terjadi karena akan menghancurkan upaya moderasi beragama.

Menurut Magnis-Suseno, yang terjadi di dalam rangka hukum harus dilindungi, dengan segala konsekuensi. Masyarakat harus mengetahui dan menyadari bahwa sikap moderat dilindungi. Sebaliknya, sikap intoleran tidak dapat dibiarkan. Magnis Suseno menegaskan bahwa Pancasila adalah kesepakatan bangsa dan sudah final. Pancasila memberi ruang untuk saling menerima, tanpa membedakan agama, suku dan budaya. Kebesaran Pancasila adalah bahwa di dalam ruang Pancasila, semua komunitas agama dan komunitas lain dapat hidup sesuai dengan cita-cita dan aspirasi mereka (Franz Magnis-Suseno, 2010). Menurut (Hidayatulloh & Saumantri, 2023b), Pancasila menjamin bahwa identitas masing-masing komunitas, oleh identitas Indonesia tidak diancam apalagi ditindas. Sebaliknya, identitas mereka dilindungi dan diangkat. Oleh karena itu, negara tidak boleh lunak terhadap segala bentuk intoleransi yang tidak menghiraukan hukum. Menurutnya, pemerintah Jokowi harus memberi instruksi, perintah tegas bahwa aparat negara tidak membiarkan tindakan-tindakan intoleran berjalan.

PENUTUP

Dari sudut pandang etika, moderasi dalam agama merupakan suatu pendekatan moral yang menganjurkan sikap tengah, keseimbangan, dan toleransi dalam menjalankan keyakinan keagamaan. Konsep ini berakar pada prinsip-prinsip etis yang mengedepankan hubungan harmonis antara individu dan masyarakat dalam konteks keberagaman agama. Moderasi beragama adalah suatu panggilan untuk menghayati dan menerapkan prinsip-prinsip etika dalam konteks agama dengan sikap yang inklusif dan

toleran. Dalam pandangan Magnis-Suseno, moderasi beragama bukan hanya sekadar keseimbangan dalam praktik keagamaan, tetapi juga mencakup sikap bermartabat terhadap individu-individu yang memiliki keyakinan yang berbeda. Dalam esensinya, pandangan Magnis-Suseno tentang moderasi beragama bukan hanya sekadar sebuah konsep, tetapi juga sebuah panggilan etis untuk menciptakan dunia di mana setiap individu dapat hidup berdampingan dengan saling menghormati, menjunjung tinggi martabat manusia, dan menghargai keberagaman kepercayaan.

Moderasi beragama menitikberatkan pada penerimaan terhadap sesama individu atau kelompok, meskipun pandangan, kepercayaan, dan keyakinan mereka berbeda. Sikap moderat mengartikan bahwa kita menerima orang lain dan kelompok lain dalam keunikannya, di tengah perbedaan yang ada. Seseorang tidak dapat dianggap moderat jika ia tidak keberatan dengan keyakinan agama orang lain hanya karena ia menganggap semua agama sama. Moderasi beragama berusaha menciptakan lingkungan yang harmonis. Keadaan harmoni mencerminkan kondisi di mana semua pihak hidup berdampingan secara damai, mau bekerja sama, saling menerima, dalam suasana yang tenang dan sepakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, N. Q., & Dewi, D. A. (2022). Sistem Etika Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. *Jurnal Pendi Tambusai*, 6(2).
- Al Azis, M. R. (2021). Dialektika Hegel (Tesis-Antitesis-Sintesis) Dalam Etika Dan Filsafat Berkomunikasi Era Kontemporer. *Jurnal Komunikasi*, 12(2), 117–122. <https://doi.org/10.31294/jkom.v12i2.10472>
- Ali, M. (2017). Aristotelianisme Dalam Kacamata Para Tokoh Abad Tengah Penentang Logika. *ALQALAM*, 24(3), 318. <https://doi.org/10.32678/alqalam.v24i3.1661>
- Bakker, A., & Zubair, A. C. (2015). *Metodologi Penelitian Filsafat*. Kanisius.
- Bartens, K. (2007). *Etika*. Gramedia.
- Bedong, M. A. R. (2020). *Mainstreaming Moderasi Beragama dalam Dinamika Kebangsaan*. IAIN Parepare Nusantara Press.
- Casanova, J. (2018). *Public Religions Revisited. In Religion: Beyond the Concept*. University Press.
- Fahri, M., & Zainuri, A. (2019). Moderasi Beragama di Indonesia. *Intizar*, 25(2), 95–100.
- Franz Magnis Suseno. (1988). *Etika Politik*. Gramedia.
- Franz Magnis Suseno. (2001). *Berfilsafat dari Konteks*. Gramedia.
- Franz Magnis Suseno. (2005). *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*. Kanisius.
- Franz Magnis Suseno. (2007). *Memahami Hubungan Antar Agama*. Elsaq Press.
- Franz Magnis Suseno. (2012). *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*. Kanisius.
- Franz Magnis-Suseno. (1998). *Javanese Etics and World-View. The Javanese Idea of the Good Life*. Gramedia Pustaka Utama.
- Franz Magnis-Suseno. (2000a). *12 tokoh etika abad ke-20*. Kanisius.
- Franz Magnis-Suseno. (2000b). *Bunga Rampai Teks-teks Etika dari Plato sampai dengan Nietzsche*. Kanisius.
- Franz Magnis-Suseno. (2001). *Etika Jawa. Sebuah Analisa Falsafi tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa*. Gramedia.
- Franz Magnis-Suseno. (2004). *Filsafat Kebudayaan Politik, butir-butir Pemikiran Kritis*. Gramedia Pustaka Utama.
- Franz Magnis-Suseno. (2005a). *Kuasa dan moral*. Gramedia.
- Franz Magnis-Suseno. (2005b). *Pluralisme Agama, Dialog, dan Konflik di Indonesia*. Interfidei.
- Franz Magnis-Suseno. (2009). *Menjadi Manusia. Belajar dari Aristoteles*. Kanisius.
- Franz Magnis-Suseno. (2010). *Membangun Kualitas Bangsa: Bunga Rampai sekitar Perbukuan Indonesia*. Kanisius.
- Franz Magnis-Suseno. (2019). *Negara Harus Intoleran terhadap Intoleransi*. Kompas.Com.
- Graham, G. (2019). *Teori-Teori Etika*. Nuansa Cendikia.
- Hidayatulloh, T., & Saumantri, T. (2023a). Kerukunan Beragama Dalam Lensa Pengalaman Keagamaan Versi Joachim Wach. *Al-Adyan: Journal of Religious Studies*, 4(1), 24–37. <https://doi.org/10.15548/al-adyan.v4i1.5876>

- Hidayatulloh, T., & Saumantri, T. (2023b). The Harmony of Islam and Pancasila in Religious Discourse in Indonesia. *Jurnal Studi Sosial Keagamaan Syekh Nurjati*, 3(1), 1–25.
- Izza, F. N. (2014). Hermeneutika: Arah Baru Interpretasi Hadis (Studi Analisis Pemikiran Yusuf Al-qardhawi Dalam Fatwa-fatwanya). *Komunika*, 8(2), 192–220. <https://doi.org/10.24090/kom.v8i2.2014.pp192-220>
- Judrah, M. (2020). Generalisasi Empirik; Proposisi, Postulat, Aksioma dan Teori. *Jurnal Al-Qalam: Jurnal Kajian Islam & Pendidikan*, 7(1), 117–122. <https://doi.org/10.47435/al-qalam.v7i1.186>
- Junaedi, E. (2019). Inilah Moderasi Beragama Perspektif Kemenag. *Harmoni*, 18(2), 182–186. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v18i2.414>
- Kinloch, G. C. (2015). *Sociological Theory: Development and Major Paradigm*. Pustaka Setia.
- Kuntowijoyo. (2010). *Islam Sebagai Ilmu Epistemologi, Metodologi, dan Etika*. Tiara Wacana.
- Novan Risbayana, N., Yuan Fimanda, A., SigaUniver, W. D., Surya Tirta Lesmana, F., & Hulu, V. (2022). Penguatan Identitas Keagamaan dan Kebangsaan Dalam Membangun Dialog Interreligius di Indonesia. *Sapientia Humana: Jurnal Sosial Humaniora*, 2(01), 145–156. <https://doi.org/10.26593/jsh.v2i01.5907>
- Rachels, J. (2013). *Filsafat Moral*. Kanisius.
- Rici, R., Denny Firmanto, A., & Wijiyati Aluwesia, N. (2022). Etika Kuliah Daring Seminari Tinggi San Giovanni XXIII dalam Perspektif Etika Franz Magnis Suseno. *VOCAT: JURNAL PENDIDIKAN KATOLIK*, 1(2), 68–77. <https://doi.org/10.52075/vctjpk.v1i2.25>
- Riyadi, H. (2015). *Melampaui Pluralisme: Etika Al-Quran tentang keragaman agama*. RM Books.
- Roosseno, T. H. N. (2016). F. Budi Hardiman (ed.), Franz Magnis-Suseno: Sosok dan Pemikirannya, Jakarta: Kompas, 2016, x+342 hlm. *Diskursus - Jurnal Filsafat Dan Teologi Stf Driyarkara*, 15(2).
- Rosnawati, R., Ahmad Syukri, A. S., Badarussyamsi, B., & Ahmad Fadhil Rizki, A. F. R. (2021). Aksiologi Ilmu Pengetahuan dan Manfaatnya Bagi Manusia. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 4(2), 186. <https://doi.org/10.23887/jfi.v4i2.35975>
- Saumantri, T. (2022). Konstruksi Nilai-Nilai Moderasi Beragama dalam Perspektif Filsafat Agama. *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 24(2), 164–180. <http://dx.doi.org/10.22373/substantia.v24i2.14854>
- Saumantri, T. (2023). Construction of Religious Moderation in Seyyed Hossein Nasr's Perennial Philosophy Perspective. *Kanz Philosophia: A Journal for Islamic Philosophy and Mysticism*, 9(1), 89–112. <https://doi.org/10.20871/kpjipm.v9i1.259>
- Syarifah Habibah. (2015). Akhlak dan Etika Dalam Islam. *Pesona Dasar: Jurnal Pendidikan Dasar Dan Humaniora*, 1(2).
- Umar, N. (2021). *Islam Nusantara: Jalan Panjang Moderasi Beragama di Indonesia*. Elex Media Komputindo.
- Viktorahadi, R. F. B. (2022a). The Meaning of Religious Moderation According to Franz Magnis-Suseno: A Phenomenological Approach. *Jurnal Iman*

- Dan Spiritualitas*, 2(2), 177–186.
<https://doi.org/10.15575/jis.v2i2.17912>
- Viktorahadi, R. F. B. (2022b). The Meaning of Religious Moderation According to Franz Magnis-Suseno: A Phenomenological Approach. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 2(2), 177–186.
<https://doi.org/10.15575/jis.v2i2.17912>